

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan masyarakat begitu cepat sebagai hasil dari proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan masyarakat.

Kejahatan yang dimaksud di atas salah satunya adalah perbuatan korupsi. Korupsi merupakan akar dari semua permasalahan negara yang mengakibatkan kemiskinan. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan oleh A. Rahma Zainudin sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah¹, bahwa “sekarang ini korupsi dapat menjatuhkan semua kalangan dan bahkan menyengsarakan suatu bangsa”. Korupsi adalah hal yang sangat diperangi oleh Pemerintah dan seluruh aparatnya.²

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan kurang efektifnya upaya pemberantasan korupsi. Hal itu menyebabkan pemberantasan korupsi belum mencapai hasil seperti yang diinginkan. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberantasan korupsi selama ini antara lain meliputi substansi, struktur, dan kultur yang menurut

¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 8.

Lawrence M. Friedman merupakan suatu sistem hukum. Dalam hal ini yang dimaksud substansi adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, struktur adalah instansi yang terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, dan kultur adalah budaya masyarakat, instansi atau aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi yang masih terlalu lemah.

Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang ini diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³

Kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya tugas aparat penegak hukum. Tidak juga pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi tanggungjawab dari pemerintahan. Tetapi kewajiban pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut juga menjadi tanggungjawab warga masyarakat Indonesia. Dijelaskan dalam Pasal 41 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 bahwa pada intinya masyarakat dapat berperan serta

³Masdar F. Mas'ud, *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*, Gama Media, Yogyakarta, 2006, hlm.31.

membantu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hukum acara pidana mengatur cara-cara yang harus ditempuh untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kebenaran materiil yang diterapkan pada sidang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini yang terpenting adalah dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Pembuktian perkara pidana akan ditentukan oleh adanya alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Alat bukti sah ialah :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Adanya alat bukti di atas yang salah satunya adalah keterangan saksi, untuk menjadi saksi sudah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 26 KUHP menyatakan :

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Pengertian saksi pelapor sendiri adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang

melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang.⁴

Selain itu dalam KUHAP secara khusus belum mengatur mengenai pengertian saksi pelapor, tetapi hanya pengertian saksi yang telah dijelaskan diatas. Meskipun demikian dari hal tersebut dapat dikaitkan dengan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 paragraf 3 yaitu “Selain saksi dan korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan”.

Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan karena saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.⁵

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu sebuah cara yaitu dengan memberikan

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Pelapor_pelanggaran, 9 Agustus 2019

⁵ Fiskia Joan Matondong, “*Perlindungan Saksi Pelapor (whistleblower) dalam tindak pidana korupsi*”, Vol. IV/No. 3/Mei/2015, diakses pada tgl 28 Juni 2019

perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor tersebut harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharap mampu menciptakan suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Proses peradilan yang dicitakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang adil, dalam hal ini dimaksud kepentingan semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat dilindungi.⁶

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 telah menjelaskan makna dari perlindungan yaitu :

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini”

Adanya jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki jaminan atas rasa aman diatur dalam Pasal 28 G yaitu:

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

⁶ *Ibid*, hlm.121

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

Berdasarkan Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang mendapatkan perlindungan tanpa ada paksaan dan ancaman dalam memberikan pengakuan yang telah dirasa adanya keresahan dan kerugian yang timbul disekitarnya.

Sebagai warga negara yang baik, seorang saksi dari tindak pidana diharapkan dapat melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian. Selain itu saksi juga dapat diminta untuk memberikan bukti secara lisan di pengadilan tentang apa yang mereka lihat dan menjawab beberapa pertanyaan pada saat pemeriksaan.⁷

Setiap orang berhak untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan pelapor dalam Pasal 1 angka 5 UU No 31 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

“pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban yang dimaksud Saksi Pelapor yaitu, orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.

Kehadiran saksi pelapor sangat perlu mendapatkan perlindungan agar pada kasus korupsi bisa dibongkar. Dalam prakteknya, kondisi tersebut

⁷Nicholas R Fyfe, *Perlindungan Terhadap Saksi Terintimidasi*, Tim Elsam, Jakarta, 2006, hlm. 1.

tidaklah persoalan yang mudah, karena banyak yang harus dikaji dan bagaimana sebenarnya menduduki saksi pelapor dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Di Indonesia telah diatur mengenai perlindungan saksi dan korban dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang-undang ini dirasa sangat diperlukan karena faktanya banyak dari saksi, korban, dan pelapor yang mendapatkan ancaman yang menimbulkan rasa takut dan keresahan bagi mereka.

Dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah mendorong masyarakat untuk berani melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum karena banyak masyarakat yang mengetahui ada tindak pidana korupsi tetapi takut untuk melaporkan.

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Luk Harsyan'in sebagai kanit 3 Sat Reskrim di Polres Kudus bahwa untuk saat ini kasus korupsi yang di tangani oleh Kepolisian di Kabupaten Kudus tidak banyak yaitu untuk 5 tahun kebelakang ini hanya ada 5 kasus korupsi dan menurut beliau faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pemberantasan korupsi adalah budaya masyarakat yang takut melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi karena belum ada wujud perlindungan yang diberikan kepada pelapor sehingga mengakibatkan banyak kasus korupsi yang tidak terungkap, dan dengan belum adanya LPSK di daerah yang membuat pihak kepolisian merasa sulit dalam penanganan tindak pidana korupsi karena tidak ada

keterbukaan antar pelapor dengan pihak kepolisian dalam memberikan laporan, yang lebih jelasnya adalah para pelapor merahasiakan identitas diri karena takut akan terancamnya kehidupan dalam pekerjaan dan masa depan keluarganya setelah ia melaporkan suatu kasus korupsi, hal tersebut berdampak pada penanganan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus belum efektif.⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan saksi pelapor dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan saksi terhadap saksi pelapor dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸Luk Harsyan'in, "wawancara pribadi", Kanit 3 Sat Reskrim Polres Kudus, tanggal 18 Februari 2019.

1. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus
2. Untuk memahami dan menganalisis praktik pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut :

- a. Diharap mampu menambah pengetahuan khususnya tentang perlindungan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi.
- b. Diharapkan mampu menambah literatur ilmu hukum terkait dengan tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut :

- a. Diharapkan mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.
- b. Diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten.
- c. Diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan kemampuan analisis penulis.

E. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang memuat hal yang menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga dapat dilihat mengenai pokok permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistemaktika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka yang berguna landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari kedudukan saksi pelapor dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus dan efektivitas perlindungan saksi terhadap saksi pelapor dalam penegakan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan untuk dipaparkan yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan bahan, metode pengolahan dan penyajian data serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini. Dari hasil penelitian yang didapat kemudian dibahas dalam satu bagian yang

tidak terpisahkan. Di dalam Bab IV ini membahas tentang kedudukan saksi pelapor dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus dan efektivitas perlindungan saksi terhadap saksi pelapor dalam penegakan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kudus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang merupakan inti dari penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

